

# *SAMBUTAN*

## **KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**



**L**aporan Kinerja (LAPKIN) Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Hukmas) tahun 2016 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja Biro Hukmas selama tahun 2016 kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Tahun 2016 merupakan tahun pelaksanaan RPJMN 2015-2019, dimana diletakkan dasar pembangunan selama lima tahun. Disadari bahwa tugas dan tanggung jawab BPOM termasuk Biro Hukmas semakin luas dan kompleks dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis serta tidak dapat diprediksikan. Selama tahun 2016 Biro Hukmas telah berupaya keras mendukung visi misi BPOM yang tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu; (1) jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun; (2) jumlah informasi obat dan makanan yang dipublikasikan; (3) jumlah layanan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti; dan (4) jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan

Untuk mencapai ke-4 indikator tersebut, selama tahun 2016 Biro Hukmas telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk perkuatan aspek legal, perkuatan peran hukum di Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut, juga telah dilakukan upaya perkuatan sumber daya manusia serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Kami sadar bahwa masih banyak yang harus kami lakukan dalam mendukung pencapaian visi misi BPOM, dan LAPKIN ini dapat menjadi potret serta kendali bagi kami di Biro Hukmas agar selalu meningkatkan kinerja. Akhir kata, kami berharap LAPKIN ini dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan kinerja Biro Hukmas pada khususnya dan BPOM pada umumnya.

Jakarta, Januari 2017  
Kepala Biro Hukum dan Humas

**Riati Anggriani, SH., MARS., M.HUM**  
NIP. 19610319 198603 2 001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagai salah satu unit kerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja (LAPKIN), sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAPKIN merupakan bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat kepada para pemangku kepentingan, di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Penyusunan LAPKIN Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Tahun 2016 berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Tahun 2015-2019 yang diturunkan ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Pada tahun kedua RPJMN 2015-2019, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat telah berhasil mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 2015-2019. Dari 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan, pada tahun 2016 ini seluruhnya sudah tercapai dengan hasil memuaskan ( $\geq 100\%$ ) yaitu (1) jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun sebesar 112%; (2) jumlah informasi obat dan makanan yang dipublikasikan sebesar 121,05%; (3) jumlah layanan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti sebesar 100,14%; dan (4) jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan sebesar 125%. Dengan demikian ketiga sasaran kegiatan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat berhasil dicapai.

Secara keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat selama tahun 2016 efisien dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,38. Dari 47 sub kegiatan yang dilakukan, semuanya dapat dilakukan secara efisien, karena nilai Indeks Efisiensi (IE)  $\geq$  Standar Efisiensi (SE). Berkaitan dengan pencapaian kinerja tersebut, maka Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat akan mempertahankan kinerja yang sudah dicapai dan terus melakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan kinerja pada masa mendatang.